



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA

KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas Mamuju

Telp. (0426)-2325088 Fax. (0426)-2325088.

Email : kanwilsulbar@kemenkumham.go.id Laman : <https://sulbar.kemenkumham.go.id>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

DIVISI ADMINISTRASI			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks
DIVISI PEMASYARAKATAN			
2	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah	81%
3	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
4	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
		8. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 orang
5	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	60%

6	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%
7	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%
8	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
9	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
DIVISI KEIMIGRASIAN			
10	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM			
11	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %
12	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84 %
13	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah	12 Permohonan
		2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus
14	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan

15	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%
16	Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Mendapatkan Pembinaan	13 Orang
17	Terselenggaranya Fasilitasi Perencanaan serta Pemantauan dan Peninjauan/Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah	2 Kegiatan
18	Meningkatkan Kesadaran Hukum serta Terpenuhinya Akses Keadilan dan Informasi Hukum Masyarakat di Wilayah	1. Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	81%
		2. Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	80%
		3. Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	76,61
		4. Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-Masing Wilayah	70%
		5. Persentase Anggota JDIHN yang Berpartisipasi Aktif	20%
19	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	1. Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	2 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah Instansi Pemerintah yang Mengaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM melalui Pelayanan Publik Bebas HAM	1 Instansi Pemerintah
20	Meningkatnya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi
21	Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%
		2. Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Disosialisasikan di Wilayah	1 Buku